

PERSEPSI MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA DI SURABAYA TERHADAP KEBANGKITAN TIONGKOK

Reza Pusparani Pertiwi
Departemen Hubungan Internasional
Universitas Airlangga
rezappertiwi@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out how the perceptions of Chinese people in Surabaya towards the rise of China. China, which is considered as the giant of Asia, is able to demonstrate its existence as an alternative power of other countries in Asia through economic power. With the rise of China through rapid economic growth, it can generate many perceptions from various circles, both positive and negative. On the other hand, Chinese society which is a Chinese diaspora considers that the rise of China can generate a sense of ethnic pride and legitimation. This is related to the memory of Chinese people who are always scapegoats. The rise of China is also considered to be able to become a medicine to eliminate racial thinking and discriminatory behaviors or anti-chinese feeling in the ethnic Chinese community in Surabaya. In this study the authors analyzed using collective memory theory and perception theory that is associated with identity. Both of these theories are related to each other, where collective memory can support the formation of individual perceptions. Data obtained by the author through sampling, and supported by data archives or government documents. But in fact, various Chinese people's perceptions emerged towards China. This study produced three types of perceptions, namely approving, middle, and denying.

Keywords : Chinese Ethnicity, Surabaya, Discrimination, Sinophobia, Anti-Chinese Feeling, Ethnic Pride, Legitimacy, Identity, Collective Memory, Perception, China's Rise.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat etnis Tionghoa di Surabaya terhadap kebangkitan Tiongkok. Tiongkok yang dianggap sebagai raksasa Asia mampu menunjukkan eksistensinya sebagai kekuatan alternatif negara-negara lain di Asia melalui *economic power*. Dengan bangkitnya Tiongkok melalui pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat mampu menimbulkan banyak persepsi dari berbagai kalangan, baik itu positif maupun negatif. Disisi lain masyarakat Tionghoa yang merupakan diaspora Tiongkok menganggap bahwa kebangkitan Tiongkok dapat membangkitkan *sense of ethnic pride and legitimation*. Hal tersebut berkaitan dengan memori masyarakat etnis Tionghoa yang selalu jadi kambing hitam. Kebangkitan Tiongkok juga dianggap mampu menjadi obat untuk menghilangkan pemikiran rasial dan perilaku-perilaku diskriminasi atau *anti-chinese feeling* masyarakat etnis Tionghoa di Surabaya. Dalam penelitian ini penulis menganalisis menggunakan teori memori kolektif dan teori persepsi yang dikaitkan dengan identitas. Kedua teori tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain, yang mana memori kolektif dapat mendukung terbentuknya persepsi individu. Data yang didapatkan penulis melalui pengambilan sampel, serta didukung oleh data arsip atau dokumen pemerintah. Namun faktanya, muncul beragam persepsi masyarakat etnis Tionghoa terhadap Tiongkok. Penelitian ini menghasilkan tiga tipe persepsi, yaitu *approving*, *middle*, dan *denying*.

Kata-kata kunci : Etnis Tionghoa, Surabaya, Diskriminasi, Sinofobia, Anti-Chinese Feeling, Ethnic Pride, Legitimasi, Identitas, Memori Kolektif, Persepsi, Kebangkitan Tiongkok.

Kebangkitan Tiongkok merupakan tema yang hangat dibicarakan oleh banyak kalangan diberbagai negara. Napoleon Bonaparte mengatakan, “*Ici repose un géant endormi, laissez le dormir, car quand il s’éveillera, il étonnera le monde*”(Vinh LE, tt).¹ Bonaparte seakan memprediksi masa depan, Tiongkok bangkit dengan *economic power*. Diwujudkan melalui konsep *The Peaceful Rise of China* yang diusulkan oleh Hu Jintao pada September 2005 dalam *60th Anniversary of the UN* melalui *China Peaceful Development Road White Paper*, di tahun 2014 Tiongkok berhasil melampaui Amerika Serikat dengan pertumbuhan GDP 17% yang lebih unggul dari Amerika Serikat yang hanya 16% (Callahan 2013).² Kebangkitan Tiongkok memang memberikan dampak yang cukup berarti bagi negara-negara Asia, namun disamping itu juga menimbulkan banyak persepsi yang muncul. Indonesia sebagai salah satu anggota negara Asia juga memiliki persepsi tertentu jika dilihat pada hubungan kedua negara. Evi Fitriani (2018, p. 1) dalam jurnal terbarunya yang berjudul *Indonesian Perceptions of the Rise of China: Dare You, Dare You Not* menjelaskan bangkitnya Tiongkok dirasakan secara berbeda oleh aktor yang berbeda dan dalam berbeda negara. Namun ada tiga permasalahan utama yang harus diperhatikan dalam melihat tentang bagaimana Indonesia memandang kebangkitan ekonomi Tiongkok.

Meskipun pelaku utama hubungan internasional dan pembuatan kebijakan luar negeri adalah para elit politik atau *stakeholder*, namun masyarakat dalam negara demokrasi juga memiliki peran sebagai pembuatan kebijakan (Fitriani 2018, p. 1). Thomas Risse-Kappen (1991) menjelaskan secara singkat bahwa opini publik diperlukan dalam pembuatan keputusan. Namun pada kenyataannya opini publik masih kurang diperhatikan oleh pemangku kebijakan. Persepsi masyarakat lokal masih sangat sedikit diperhatikan, terutama pada minoritas seperti masyarakat etnis Tionghoa di Surabaya yang memiliki peran penting dalam arena politik, ekonomi, sosial, dan kultural. Keturunan Tionghoa meskipun dianggap sebagai pendatang, tetapi juga memberikan kontribusi kepada Indonesia. Masyarakat etnis Tionghoa dikenal dalam keahliannya melakukan bisnis, hal ini juga telah menjadi kontribusi kultural masyarakat Tionghoa dan berpengaruh cukup signifikan dalam kegiatan ekonomi Indonesia. Sedangkan dalam segi politik, masyarakat etnis Tionghoa berusaha membantu kemerdekaan Indonesia. Seperti Liem Koen Hian yang melahirkan Partai Tionghoa Indonesia yang mendukung gerakan Indonesia merdeka (CNN Indonesia 2019). Atau Laksamana Muda John Lie yang menembus blokade Belanda dengan kapal ML 336 (Mukhti 2010). Adanya kontribusi masyarakat Tionghoa tersebut kemudian menunjukkan bahwa penelitian ini mengarah pada identitas masyarakat etnis Tionghoa sebagai hasil diaspora Tiongkok, ditambah dengan kurangnya penelitian yang berfokus pada opini publik yang jarang diperhatikan oleh pemangku kebijakan kemudian menjadi urgensi dari penelitian penulis.

¹ Memiliki arti, “disinilah seekor raksasa tertidur, biarkan dia tidur, karena ketika dia terbangun, maka dia akan mengejutkan dunia”.

²Dalam bahasa mandarin lebih dikenal dengan sebutan *heping fazhan*, yang berisi lima strategi Tiongkok untuk mencapai keunggulan ekonomi dalam pembangunan negara, yaitu: (1) pembangunan berkedamaian adalah cara yang tidak dapat dihindarkan dalam modernisasi Tiongkok; (2) mempromosikan perdamaian dan pembangunan dunia yang beriringan dengan pertumbuhan Tiongkok; (3) melakukan reformasi dan inovasi untuk mencari keuntungan bersama dan pembangunan umum negara lain; (4) bergantung pada kekuatan sendiri dalam hal pengembangan negara; dan (5) membangun harmonisasi dan kesejahteraan bersama dalam hubungan negara terkait dengan perdamaian yang berkesinambungan.

Memori Kolektif Masyarakat Etnis Tionghoa di Surabaya

Awal mula persebaran Tionghoa di Indonesia menurut catatan informasi dari Tiongkok menjelaskan bahwa beberapa pemuka agama Budha mulai melakukan perjalanan hingga ke Nusantara setelah Masehi. Pemuka agama Budha yang singgah pertama kali di Jawa adalah Fa Hsien pada tahun 413M, kemudian disusul oleh Hwi Ning yang singgah di daerah Holing atau Jawa Utara pada tahun 664M dan Pendeta I Tsing yang singgah di Sriwijaya pada tahun 671M (Marzali 2015). Cerita lain juga menyebutkan bahwa imigran Tionghoa merantau dengan alasan untuk mencari kehidupan yang layak. Adanya situasi dalam negeri Tiongkok yang tidak stabil akibat adanya penyerangan bangsa Manchu yang merupakan salah satu golongan etnis Tungusik dan berasal dari wilayah Manchuria (Hanzi: 滿州, pinyin: *Mǎn zhōu*), merupakan wilayah yang berada sebelah Timur Laut Tiongkok yang dekat dengan perbatasan Korea Utara dan Rusia. Wilayah Manchuria meliputi provinsi-provinsi Tiongkok Utara, seperti Jilin, Heilongjiang dan Liaoning yang menjadi wilayah bangsa Manchu terbanyak (Tan 2015). Hal tersebut diperkuat oleh Andjarwati Noordjanah dalam bukunya yang menjelaskan bahwa imigrasi masyarakat Tionghoa semakin meningkat karena didorong oleh beberapa faktor, seperti peperangan, kondisi geografi yang tidak mendukung, jalan hidup yang susah setelah adanya bencana alam dan didukung pulang adanya teknologi pelayaran yang juga mendorong tekad mereka untuk merantau ke negeri selatan yang dipahami sebagai negeri dengan kekayaan alam yang tinggi (Noordjanah 2010, p. 37). Kehadiran perantau Tionghoa di Indonesia memberikan dampak positif semenjak masa kerajaan dengan berkontribusi cukup banyak bagi perekonomian, sehingga diperlakukan dengan baik yang setara dengan pejabat penting kerajaan (Perkasa 20112, p. 47). Disamping itu kontribusi yang lain pada masa lalu yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa yang menetap di Jawa adalah mengembangkan kota dengan membuat pelabuhan-pelabuhan di sekitar Pantai Utara, seperti di daerah Tuban, Gresik dan Surabaya.

Sedangkan jika berbicara memori kolektif masyarakat etnis Tionghoa, perlu dipahami bahwa memori kolektif merupakan kumpulan memori, pengetahuan, atau informasi yang dikonsumsi bersama dalam suatu kelompok sosial dan berkaitan dengan identitas kelompok (Hirst & Manier 2015). Konsep memori kolektif pertama kali dikembangkan pada masa kontemporer oleh Maurice Halbwachs dalam tulisannya pertama kali yang berjudul *La Mémoire Collective* yang kemudian diterjemahkan oleh Lewis A. Coser (1992) dalam bahasa Inggris, mengatakan bahwa setiap individu akan memperoleh ingatannya dalam lingkungan sosial. Memori dibentuk dari masa ke masa, sehingga disebut sebagai variabel yang tidak konstan. Memori kolektif dibentuk secara tidak langsung dari ingatan-ingatan suatu kelompok dalam masyarakat. Hal tersebut diperkuat oleh Halbwachs yang berpendapat bahwa memori dapat diingat kembali dengan memikirkan atau mempelajari kembali dengan cara melihat melalui jangka waktu dan tempat sebagai alat untuk mengkaji pola memori yang ada (Coser 1992, p. 151). Dalam arti lain, memori kolektif dibentuk melalui pengalaman nyata suatu kelompok yang berkaitan dengan aspek spasial. Reza Wattimena (2009) menambahkan bahwa kumpulan memori yang muncul dari kelompok sosial kemudian dipahami sebagai entitas kolektif yang terdiri dari jaringan berbagai ide mengenai masa lalu yang ada. Wattimena (2009) menambahkan dalam tulisannya yang lain, bahwa memori kolektif juga dibentuk atas proses komunikasi yang berkelanjutan antar individu. Sehingga secara tidak langsung memori kolektif juga berfungsi sebagai alat proses sosial.

Tahun 1740 adalah titik awal perilaku *anti-chinese feeling* ada. Pada masa ekspansi VOC pada awalnya membaik saat diperintah oleh Gubernur Jan Pieterszoon Coen, namun ketika masa kepemimpinan Johannes Camphujs imigran Tionghoa yang masuk ke Indonesia dibatasi. Johannes Theodorus Vermeulen dalam bukunya yang berjudul *De Chineezen te Batavia en de Troebelen van 1740* dan diterjemahkan oleh Gatot Triwira menjelaskan bahwa pada tanggal 21 Mei 1690 peraturan dikeluarkan oleh VOC dengan alasan agar tidak banyak kelompok-kelompok orang Tionghoa di Batavia, hal ini karena dilihat dari latar belakang para imigran

yang berasal dari Tiongkok untuk meninggalkan negaranya sebagai pedagang, tetapi seringkali melakukan tindakan kriminal, seperti mencuri dan menipu (Vermeulen 2010, p. 25). Disisi lain dalam menjalankan perdagangannya VOC menginginkan keuntungan, sehingga VOC mulai memanfaatkan masyarakat Tionghoa sebagai mitra dagang dan diperlakukan berbeda dari masyarakat pribumi. Namun relasi baik antara VOC dan masyarakat Tionghoa tidak berlangsung sangat lama. Pada Oktober tahun 1740, dalam buku Jakarta: Sejarah 400 tahun karya Susan Blackburn menjelaskan bahwa timbulnya pemberontakan oleh masyarakat Tionghoa dipicu oleh jatuhnya harga gula yang kemudian merugikan VOC (Blackburn tt). Sebagaimana yang dijelaskan oleh J.L. Blusse:

“Habisnya sumber daya tanah dan hutan telah menekan industri ini (gula) dan kemudian ditambah lagi dengan kemunduran ekspor karena telah ditutupnya pasar Persia yang menguntungkan itu. Yang paling dirugikan adalah orang Cina. Hampir semua pabrik gula dimiliki orang Cina dan dikerjakan orang-orang Cina, terutama oleh para imigran yang baru datang ke Batavia. Sebagian besar komunitas Cina juga tergantung secara langsung maupun tidak langsung pada industri ini.” (Rommelink dalam Subroto 2017, p. 14)

Jatuhnya harga gula tersebut kemudian membuat pabrik-pabrik VOC bangkrut dan meningkatkan angka pengangguran, sehingga VOC membatasi jumlah imigran yang masuk ke Indonesia. Usaha VOC untuk mengurangi populasi Tionghoa di pulau Jawa adalah dengan mengembalikan pulang masyarakat Tionghoa yang sudah lama menetap di Jawa pada 10 Juni 1727. Kemudian semakin diperparah dengan resolusi yang dikeluarkan oleh VOC pada 25 Juli 1740 dengan memerintahkan seluruh masyarakat Tionghoa yang mencurigakan harus ditangkap dan diperiksa, jika orang Tionghoa yang ditangkap tidak bekerja maka akan dipulangkan ke Tiongkok atau justru dibuang ke Ceylon atau Sri Lanka dan Tanjung Harapan untuk dijadikan pekerja, namun isu bahwa orang-orang Tionghoa yang dikirim kemudian dibuang di tengah laut saat perjalanan mereka memicu pemberontakan (Rommelink dalam Subroto 2017, p. 14).

Pemberontakan masyarakat Tionghoa terhadap VOC kemudian dikenal sebagai peristiwa Geger Pacinan atau Tragedi Angke, kurang lebih 100 orang Tionghoa dari berbagai kalangan dipimpin oleh Khe Pandjang dan Wang Tai Pan saat itu mengumpulkan kekuatan dan dilanjutkan oleh milisi Tionghoa yang dipimpin juga oleh Khe Pandjang dan berhasil menghimpun ratusan massa di sekitar Pabrik Gula Gandaria dan pertama kali menyerang pos-pos VOC di *Meester Cornelis* dan *De Qual* pada 7 Oktober 1740 (Subroto 2017, p. 16). Dalam menanggapi pemberontakan masyarakat Tionghoa pada masa itu, VOC mulai memberlakukan jam malam dan larangan kepada masyarakat Tionghoa untuk menyimpan senjata. Dibawah pemerintahan Gubernur Jenderal Adriaan Valckenier, VOC membantai orang-orang Tionghoa yang puncaknya pada 10 Oktober 1740 dengan mengumpulkan seluruh orang Tionghoa di Batavia di lapangan depan balai kota, kemudian dieksekusi satu persatu dan lebih dari 10.000 jiwa orang Tionghoa tewas (Subroto 2017, p. 17).

Gambar 3.1. Ilustrasi pembantaian geger pecinan



Sumber : Subroto 2017, p. 17

Pembantaian masyarakat Tionghoa tersebut kemudian memiliki dampak yang cukup signifikan bagi VOC dan semakin memperburuk keadaan dengan mendapatkan kecaman dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Akibatnya perekonomian VOC tidak semakin membaik, bahkan melemah. Sistem distribusi perdagangan VOC yang terhambat dan kelangkaan barang dengan jumlah yang besar karena orang Tionghoa yang seharusnya menjadi pedagang perantara sistem perdagangan VOC telah berkurang (Subroto 2017, pp. 17-18).

Perilaku-perilaku diskriminatif terhadap masyarakat Tionghoa tidak berhenti setelah VOC bubar. Diskriminasi, sinofobia atau *anti-chinese feelings* Belanda yang menjajah Indonesia pada waktu itu semakin menguat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya peraturan-peraturan pemerintah Belanda yang begitu membatasi masyarakat Tionghoa, khusus di Surabaya. Dalam bukunya, Noordjanah (2010, p. 82) sekali lagi menjelaskan beberapa peraturan-peraturan Belanda yang sangat membatasi masyarakat Tionghoa yang cenderung diskriminatif. Misalnya seperti larangan untuk menghilangkan identitas masyarakat etnis Tionghoa yang identik dengan rambut berkucir panjang yang di kepeng dengan rapi dan dililit dengan pita merah atau disebut dengan *thauwcang* dan penggunaan pakaian Tionghoa, jika hal tersebut tetap dilakukan justru masyarakat etnis Tionghoa dianggap sebagai pelaku kriminal dan akan diberikan sanksi hukuman (Noordjanah 2010, p. 82). Pendapat Noordjanah (2010) diperkuat oleh artikel Entje Ismail dalam Koran Pemberita Betawi pada 22 Agustus 1901:

“Hoekoeman Menjalin Bangsa...

Barang siapa jang berani menjalin bangsa, merobah sipat bangsanja, maka ialah terantjem hoekoeman politie rol... apabila orang Tjina boewang taiwtjangnja, tidak boleh loepoet hoekoeman politie rol kasi hoekoeman krakal doea belas hari atawa lebih... Orang-orang Tjina pertandaan dari Tautjangnja; Orang-Orang Olanda pertandaan dari topo sepatoenja; Orang-orang Islam pertandaan dari setangan kepala dan trompanja dan orang-orang Arab dari oedang-oedangnja, tetapi kepa orang-orang Tjina sadja jang dihoekoem kaloe ia berani boewang itoe tauwtjangnja?”

Tidak hanya itu, masih terdapat beberapa peraturan lain yang diberlakukan oleh Belanda terhadap masyarakat Tionghoa. Peraturan lainnya seperti Kemudian semakin diperketat dengan peraturan *passenstensel* yang berlaku semenjak 1816, peraturan yang membatasi gerak

masyarakat Tionghoa dengan harus memiliki ijin jika masing-masing etnis ingin keluar dari wilayahnya. Kemudian pada 6 Juni 1866, mulai diberlakukan peraturan *wijkenstelsel*, bahwa setiap etnis memiliki wilayahnya masing-masing. Pemusatan tempat tinggal masyarakat Tionghoa dan Asia Asing lainnya berada di kawasan Pecinan. Batas kawasan Pecinan pada masa kolonial Belanda ditandai dengan Jalan Karet di bagian Barat, Jalan Cokelat di bagian Selatan, Jalan Kembang Jepun di bagian Utara dan di bagian Timur dibatasi oleh Jalan Slompretan. Sanksi yang diberlakukan terkait adanya peraturan *wijkenstelsel* tersebut adalah penjara atau denda sebesar f25 – f100.³ Hal tersebut diperjelas oleh catatan resmi pemerintah Belanda pada tahun 1866:

“Vreemde oosterlingen, die zich in strijd met deze verordening vestige buiten de voor hunnen landaard aangewezen wijken, verbeuren eene boete van f25 tot f100. Zij zijn verplicht, op eerste aanzegging, hunne woonplaats naar een duer wijken over te brengen, en kunnen des noods door de openhare magt daartoe worden gedwongen.” (Staatsblad van Nederlandsche Indie, No. 57 Tahun 1866).⁴

Kebijakan Belanda yang lain adalah pemberlakuan *Agrarische Wet* atau Hukum Agraria di tahun 1870, kebijakan yang mengatur sistem kepemilikan tanah yang juga membatasi masyarakat Tionghoa untuk tidak terlalu banyak memiliki tanah di daerah pedesaan (Noordjanah 2010, p. 85). Sedangkan dalam hal hukum, masyarakat Tionghoa diadili dengan hukum *politierol*. Hukuman ini menunjuk seorang kepala polisi sebagai hakim dan dianggap sebagai tindak pemerasan, hal ini karena kepala polisi yang bertugas bisa dengan memberikan hukuman tanpa harus mendengarkan kesaksian seorang saksi (Noordjanah 2010, p. 85). Namun jika peradilan memang membutuhkan saksi, maka saksi yang dihadirkan tidak diwajibkan disumpah terlebih dulu sehingga dapat memberikan kesaksian palsu yang memberatkan terdakwa (Purcell 1951, p. 508). Selain *politierol* masyarakat Tionghoa dalam sistem hukum masyarakat sering kali dikenakan *landraad* dan *Raad van Justitie*. Menurut Daniel S. Lev (1985, pp. 85-86), *Landraad* merupakan dewan pengadilan negeri yang dikhususkan untuk *inlander* dan orang asing non-Eropa yang dikepalai oleh ahli hukum dari kalangan Belanda beserta Jaksa, pegawai pencatatan dan penasehat dari Tionghoa, sedangkan *Raad van Justitie* adalah pengadilan tingkat tinggi bagi orang Eropa yang keseluruhan pihak peradilan adalah orang Belanda.

Dalam *Regering Reglement 1854* struktur masyarakat dibagi menjadi tiga golongan yang semakin mengkotak-kotakkan masyarakat, ditambah dengan adanya peraturan-peraturan tersebut justru menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat Tionghoa. Sehingga masyarakat Tionghoa dalam kurun waktu yang lama, mempercayai dan menanamkan paham bahwa mereka memiliki musuh bersama yaitu orang Belanda dan Eropa yang harus dihadapi dengan bersama-sama, salah satu caranya adalah dengan menguatkan rasa bangga atau nasionalisme Tionghoa (Lev 1985, pp. 85-86). Untuk mengatasi rasa nasionalisme Tionghoa yang berlebihan tersebut, kemudian pada tahun 1907 Belanda juga mengeluarkan Undang-Undang Kaula Belanda, bahwa seluruh anak-anak Tionghoa yang lahir di seluruh Hindia Belanda maka akan dianggap sebagai warga negara Belanda (Lev 1985, pp. 85-86). Di tahun

³ Gulden merupakan mata uang yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama lain dari Gulden adalah *Florijn* sehingga dalam simbolisasi menggunakan symbol ‘f’ atau ‘fl’, terkadang juga menggunakan singkatan NLG atau kepanjangan dari *Nederlandsch Gulden*. Sedangkan, 1 Gulden (f1) jika dikonversikan pada Indonesia Rupiah (IDR) saat ini bernilai sekitar Rp. 74.200,-

⁴ Yang berarti: “Orang asing yang tinggal di luar distrik yang ditunjuk untuk sifat mereka, bertentangan dengan peraturan ini, kehilangan denda NLG 25 hingga NLG 100. Mereka diwajibkan, pada pemberitahuan pertama, untuk memindahkan tempat tinggal mereka ke lingkungan yang berbeda, dan mungkin dipaksa untuk melakukannya oleh publik jika perlu”.

yang sama pula, peraturan *passenstelsel* mulai di hapuskan dan di tahun 1917 dilanjutkan dengan penghapusan peraturan *wijkenstelsel* dan surat *passenstelsel* di tahun berikutnya (Suryadinata 1994, p. 23)

Perilaku-perilaku diskriminasi tidak hanya dilakukan oleh pihak koloni, tetapi juga masyarakat pribumi. Dalam artikel Hendri F. Isnaeni (2010), di tahun 1912 tercatat kerusuhan anti Tionghoa di Solo yang dipicu oleh persaingan dagang Batik antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Jawa dan dilanjutkan pada tahun 1918 di Kudus yang juga dipicu oleh persaingan dagang antar pedagang rokok yang berakibat rumah orang-orang Tionghoa dibakar dan toko-toko dijarah oleh Sarekat Islam. Hal tersebut kemudian semakin menguatkan rasa nasionalis masyarakat Tionghoa terhadap nenek moyangnya dan beranggapan bahwa Tionghoa adalah golongan tersendiri dan tidak boleh menggantungkan diri kepada siapapun, serta berusaha untuk memperbaiki kedudukan masyarakat Tionghoa dalam struktur sosial, hasilnya adalah Belanda memasukkan Liem Koen Hian dalam *Volksraad* (Dewan Rakyat) dan *Indie Weerbaar* (Pertahanan Hindia) (Noordjanah 2010, p. 92). Masuknya Liem Koen Hian dalam *Volksraad* dan *Indie Weerbaar* kemudian mendefinisikan kedudukan masyarakat Tionghoa, hal ini penulis kutip dari dari Koran *Sin Po*:

“Boekan Persenan, tapi Hak

Pergerakan orang Tionghoa dari djaman sabelonnja ada Volksraad mesti diakoeh ada djaoe lebih berapi dan lebih bersoemanget dari sekarang, jalah sasoedanja si Volksraad ada wakil –wkail Tionghoa. Sabelonnja ada Volksraad orang Tionghoa soeda giat tjampur politiek, tjoema sadja itoe dilakoeken dengan setjara djaoe lebih actief dan loeas dari sekarang. Sebabnja tentoe sadja banjak, tapi sala-satoe sebab jang paling dalem maskepoen tida begitoe kaliatan, ada perobahan sikepp dan perobahan mentalitteit dari si Tjina sendiri...Dari itoe baek sekali orang bikin bangoen lagi bangsa Tionghoa jang marika boekan golongan jang tjoema boleh 'Steur zahlen, Mund halten' (bajar belasting dan toetoep moeloet sadja), tapi jang djoega mempoenjai hak-hak. Sala-satoe antara itoe hak-hak, ada hak boeat diperlakoekan sama rata dan tida di blakangin pada laen golongan...Kita-orang tida oesa berlakoe tjongkak, tapi kita-orang poen tida boleh maen trima nasib dan merendah sadja dan kita haroes pegang kentjeng Hak kita.” (Sin Po 1932, pp. 444-445).

Setelah teks proklamasi dibacakan, harapan baru muncul diantara masyarakat Tionghoa. Di Surabaya, masyarakat Tionghoa yang awalnya dianggap sebagai bangsa asing kemudian diberi pilihan untuk menyatakan diri sebagai warga negara Indonesia. Namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat Tionghoa secara tegas menyatakan diri sebagai warga negara Indonesia, sebagian masih merasa ragu untuk menjadi warga negara Indonesia karena akan menghilangkan identitas kecinaan mereka sebagai warga Tionghoa (Noordjanah 2010, p. 109). Donald E. Willmott (1961, pp. 22-28) menjelaskan bahwa terdapat Undang-Undang yang membebaskan masyarakat Tionghoa untuk memilih menjadi warga negara Indonesia atau justru menolaknya, namun karena pada masa itu masih dalam suasana revolusi maka Undang-Undang tersebut tidak berjalan sebagaimana semestinya. Sehingga di tahun yang sama setelah proklamasi, pada bulan Oktober hingga November terjadi bentrokan di Surabaya, kelompok Tionghoa yang tidak anti-Republik kemudian membantu Belanda sebagai mata-mata (Suryadinata 1994, pp. 130-131; Noordjanah 2010, p. 111). Sehingga akhirnya pada 14 Mei 1959 pemerintah Indonesia mengeluarkan PP No. 10/1959 yang berisi bahwa semua masyarakat Tionghoa yang memiliki usaha dagang kecil milik warga negara asing di bawah tingkat kabupaten tidak diberi izin setelah 31 Desember 1959, akibatnya banyak orang Tionghoa

meninggalkan Indonesia karena adanya kekhawatiran untuk tindak-tanduk diskriminasi masa yang akan datang (Shahab 2016; Febby, wawancara pribadi, 5 Maret 2019).

Tahun 1965, tindak rasialisme terjadi karena anggapan bahwa Tiongkok pada waktu itu memberikan dukungan paling besar pada Gerakan 30 September (G30S), sehingga masyarakat bumiputera kemudian mengeneralisir terhadap apa saja yang berkaitan dengan Tiongkok, salah satunya adalah masyarakat Tionghoa yang masih dianggap sebagai orang asing dan pendatang dari Tiongkok (Isnaeni 2010). Peristiwa G30S kemudian membuat renggang hubungan Indonesia dengan Tiongkok. Munawir Aziz (2017) dalam artikelnya menjelaskan bahwa setelah peristiwa G30S pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia dipaksa untuk melepaskan kebudayaannya. Dalam mengatasi hal itu berbagai cara dilakukan oleh pemerintah, pertama melalui Keputusan Presiden No. 127/U/Kep/12/1966 dengan alasan penyeragaman nama-nama warga negara Indonesiamasyarakat Tionghoa diharuskan mengganti nama sesuai dengan nama-nama Indonesia sebagai upaya mempertahankan identitas nasionalisme (Kristiantoro 2018, pp. 40-41). Kedua, melalui keputusan Presiden No. 14/1967 yang hanya mengakui 5 agama, sedangkan pada saat itu masyarakat Tionghoa banyak menganut kepercayaan Budha, Konghucu, dan Tao Kristiantoro 2018, pp. 40-41). Ketiga, sesuai dengan Keputusan Presiden No. 49/V/IN/8/1967 pemerintah melarang penggunaan bahasa mandarin atau materi publikasi yang ditulis dengan *Hanzi* (Susanto 2011, p. 69). Terkait hal ini, Charles Coppel (2002, p. 24) menganggap bahwa Keputusan presiden tersebut merupakan perilaku diskriminasi yang paling gambling dilihat disamping tidak ada pelarangan penulisan bahasa asing lainnya seperti tulisan Arab atau huruf Kanji.

Keempat, kebijakan bahwa setiap warga Tionghoa harus memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atau SBKRI. Kebijakan ini merupakan salah satu dari hasil warisan penjajahan Belanda pada UU Kaula Belanda. Pembuatan SBKRI memiliki proses yang cukup panjang dari sebelum masa Orde Baru. Wahyu Efendi atau dikenal dengan Tjoa Jiu Tie dan Prasetiadji (2008, pp. 10-20) dalam bukunya menjelaskan bahwa setelah proklamasi di tahun 1948, orang-orang bangsa asing diberikan masa opsi dua tahun untuk memutuskan sikap memilih menjadi kewarganegaraan Indonesia atau justru menolaknya. Kemudian pada 20 Januari 1960 terkait kewarganegaraan masyarakat Tionghoa, Indonesia membuat perjanjian Dwi Kewarganegaraan dengan Tiongkok namun kemudian perjanjian tersebut tidak berlaku setelah ditetapkan UU No. 4 Tahun 1969 untuk mengganti UU No. 2 Tahun 1958 (Effendi & Prasetiadji 2008, pp. 10-20). Namun dengan alasan untuk memfasilitasi pembuktian status kewarganegaraan Indonesia bagi warganegara keturunan asing, maka di tahun 1977 dikeluarkan Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1977 yang memasukan SBKRI dalam pendaftaran kependudukan sipil (Effendi & Prasetiadji 2008, pp. 10-20).

Namun meskipun SBKRI secara umum dikhususkan untuk WNI keturunan asing, praktiknya dikhususkan bagi seluruh masyarakat Tionghoa saja sedangkan WNI keturunan asing yang lainnya tidak diwajibkan. Penggunaan SBKRI dianggap sebagai alat diskriminasi yang dikhususkan untuk masyarakat Tionghoa. Sisi buruk lainnya adalah bahwa keberadaan SBKRI juga digunakan sebagai sumber KKN, seperti yang ditekankan oleh Frans Hendra Winarta dalam surat kabar Kompas Edisi 24 Juni 2002:

“Kebijakan diskriminatif dengan diwajibkannya WNI keturunan Cina memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI) pada awalnya memag lebih

Gambar 3.3. Salah Satu Warga Tionghoa Dicegat Pada Tahun 1966



Sumber : Herman Tan, 2017

berlatar belakang politik rasialis dan keamanan. Namun seiring dengan perkembangan waktu, masalah itu sudah menjadi sumber untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)...Biaya untuk mengurus SBKRI menurut pemantauan Kompas, di biro-biro jasa di Jakarta bervariasi antara Rp 1 juta hingga Rp 7 juta...”

Meskipun telah ada Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1996 yang menyatakan penghapusan SBKRI, namun penggunaan SBKRI tetap dipertahankan paling tidak sampai masa reformasi. SBKRI masih seringkali digunakan untuk pembuatan paspor atau dokumen-dokumen yang menyangkut kewarganegaraan lainnya sampai di tahun 2003 (The Jakarta Post 2003).

Orde Baru adalah masa ketika pergolakan politik di Indonesia sangat tinggi, dua tahun setelah dikeluarkannya UU tentang penghapusan SBKRI kekuasaan Presiden Soeharto jatuh. Leo Suryadinata (2001) menjelaskan bahwa pada masa periode Soeharto berlangsung selama 32 tahun, pemerintah hanya berfokus pada bagaimana mengasimilasi etnis Tionghoa hingga setelah kejatuhannya kemudian muncul pendekatan-pendekatan yang lebih berorientasi pada penegasan dan hak-hak etnisitas. Jatuhnya Presiden Soeharto ditandai dengan adanya kekerasan yang hebat terhadap masyarakat etnis Tionghoa di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Medan, Solo dan Surabaya. Kerusuhan di tahun 1998 awalnya antara pemerintah dengan mahasiswa yang menuntut untuk Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden karena dianggap sebagai presiden yang otoriter dan ditambah dengan ekonomi yang merosot tajam. Dimulai pada 13 Mei 1998, Jakarta sebagai ibukota Indonesia menjadi saksi kerusuhan yang berdampak pada etnis Tionghoa. Toko-toko digeledah, dijajah dan dibakar bahkan banyak perempuan dari etnis Tionghoa diperkosa, disiksa dan dibunuh meskipun pemerintah masih menutupi hal tersebut sehingga banyak keluarga Tionghoa terutama yang memiliki anak perempuan untuk berusaha melarikan diri seperti ke Bali, Kalimantan, Sulawesi Utara atau ke luar negeri (Suryadinata 2001).

Selain dampak traumatis, kerusuhan Mei 1998 juga memberikan dampak yang berlipat ganda, seperti memicu masyarakat Tionghoa mengungsi ke beberapa wilayah dan negara dalam jumlah yang cukup banyak. Majalah Tempo (dalam Suryadinata 2001) mencatat sekitar 152.000 orang mengungsi dan melarikan diri keluar dari Indonesia, 72,7% dari jumlah itu menyatakan ingin kembali ke Indonesia ketika situasi kembali normal, 18,2% yang ragu untuk mengatakan akan kembali dan sisanya sebanyak 9,1% mengatakan tidak ingin kembali. Dampak yang lainnya menghasilkan pelarian modal lebih lanjut, selama eksodus 1998 banyak masyarakat Tionghoa melarikan diri dengan membawa sebanyak US \$110 miliar (Pikiran Rakyat, 6 Juni 1998). Sehingga akhirnya dampak yang ketiga dengan melihat beberapa hal sebelumnya, semakin memberikan kesadaran etnis dan politik yang lebih besar di antara etnis Tionghoa di Indonesia (Suryadinata 2001).

Gambar 3.4. SBKRI



Sumber : Budi Setiyono, 17 Oktober 2017, *Warga Tanpa Negara* [daring].

Sebelum kerusuhan di Jakarta memuncak dan kemudian menyebar ke kota besar lain di Pulau Jawa, Medan merupakan kota yang memulai kerusuhan dan dianggap sebagai uji coba. Pada awal bukan Mei 1998 banyak penyerangan terjadi dari berbagai pelaku. Pada pagi hari di tanggal 5 Mei, beberapa pelaku yang melakukan kekerasan di Medan ditangkap karena menyerang, menjarah dan membakar toko milik Tionghoa dan mampu teratasi oleh satuan polisi (Panggabean & Smith 2011, p. 235). Kerusuhan dipicu adanya kelompok rasial yang tidak dikenal untuk menghasut penduduk setempat agar melakukan perusakan, pembakaran dan penjarahan yang diutamakan untuk semua toko, pabrik atau rumah milik masyarakat etnis Tionghoa di Medan (Waspada 7 Mei 1998). Beberapa pemilik toko Tionghoa mencoba untuk melawan dan mempertahankan barang-barang mereka, tetapi kemudian mereka menyerah dan melarikan diri, enam orang meninggal dalam kerusuhan ini karena terperangkap dalam toko yang terbakar (Suara Pembaruan, 7 Mei 1998). Awal kerusuhan memang bentuk protes masyarakat yang anti-rezim Soeharto namun kemudian berubah menjadi tindak kekerasan anti-Tionghoa. Pada akhirnya banyak dari keluarga Tionghoa terpaksa melarikan diri ke Penang melalui Selat Malaka (O'Rourke 2002).

Ketika kerusuhan meletus di Jakarta, di Surabaya lebih cenderung aman. Hal ini karena sebelumnya telah beredar isu akan ada provokator yang memicu kerusuhan di Surabaya. Bahan orang terkemuka seperti Abdurrahman Wahid ketua Ulama Nahdlatul Ulama telah memberikan peringatan kepada masyarakat Surabaya untuk mengambil apapun yang diperlukan dalam mempertahankan diri (Panggabean & Smith 2011, p. 237). Yang berbeda dari Surabaya adalah rasa 'guyub' masyarakat Surabaya yang menyatu dan menghindari adanya perbedaan. Misalnya saat peristiwa Bom Gereja pada Mei 2018, meskipun kebanyakan korban berasal dari etnis Tionghoa dan beragama Kristen tetapi banyak warga Surabaya yang memberikan bantuan seperti donor darah untuk korban atau sumbangan makanan dan uang untuk gereja. Masyarakat Surabaya belajar dari berbagai kota di Indonesia dengan melihat hubungan antara masyarakat Tionghoa dan Pribumi yang masih memiliki jarak. Surabaya dengan istilah 'arek-arek Suroboyo' lebih mengutamakan solidaritas dan toleransi yang tinggi dan menjadi satu kesatuan sebagai warga Surabaya.⁵ Adanya isu provokator yang memicu kerusuhan di Surabaya kemudian membuat warga-warga Surabaya lain

Gambar 3.5. Penjarahan Pada Kerusuhan Mei 1998



Sumber : Arzia Tivany Wargadiredja, 19 Mei 2018, *Pengakuan Pelaku Kerusuhan Mei 98: Korban Operasi Kerusuhan Sistematis* [daring]

Gambar 3.6. Warga Surabaya Mengantri untuk Donor Darah di PMI



Sumber : Info Publik, 14 Mei 2018, *Bantu Darah Korban Teror Bom, Warga Surabaya Masih Berdatangan di PMI Surabaya* [daring]

⁵ Arek-arek Suroboyo berasal dari bahasa arekan atau bahasa Surabaya yang memiliki arti orang-orang Surabaya atau warga Surabaya. Merupakan konsep yang menggambarkan 'guyub' yang juga memiliki arti 'rukun' atau lebih tepatnya memiliki ikatan persaudaraan yang kuat antar sesama warga Surabaya.

yang bukan dari etnis Tionghoa saling membantu dan saling menyelamatkan tetangga atau orang Tionghoa yang dikenalnya (Ratmoko, wawancara pribadi, 11 Maret 2019). Disisi lain, masyarakat etnis Tionghoa di Surabaya juga bekerja sama dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah selama krisis berlangsung, yakni dengan cara menyediakan logistik untuk aparat keamanan seperti makanan dan minuman (Santoso, wawancara pribadi, 16 Maret 2019).

Berakhirnya Orde Baru berarti menandakan berakhirnya masa-masa represif bagi masyarakat Tionghoa. Pada masa Reformasi yang ditandai setelah mundurnya Soeharto sebagai Presiden, telah memberikan peluang masyarakat Tionghoa untuk lebih bebas berekspresi. Di bawah pemerintahan Presiden B.J. Habibie, keluar Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 mengenai pelarangan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi agar tidak ada lagi jarak antara warga bumiputera dan Tionghoa. Kemudian dibentuklah partai-partai politik baru yang tiga diantaranya merupakan partai yang didominasi oleh etnis Tionghoa, meskipun beberapa kelompok etnis Tionghoa cenderung lebih mendukung adanya LSM sehingga kemudian membentuk Paguyuban Marga Sosial Tionghoa Indonesia (PSMTI) atau dengan nama lain *Yinni Baijixing Xiehui* pada 28 September 1998 yang setahun kemudian pecah dan membentuk LSM baru seperti Perhimpunan INTI pada 5 Februari 1999 (Suryadinata 2003, p. 3).

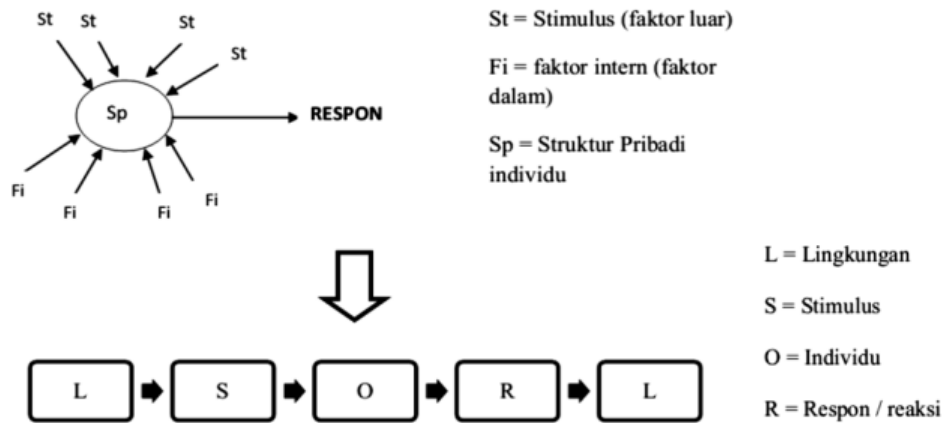
Setelah Presiden B.J. Habibie digantikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 20 Oktober 1999. Dua bulan setelah menjabat menjadi Presiden, Abdurrahman Wahid atau bisa disebut dengan Gus Dur mengeluarkan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 yang ditetapkan pada 17 Januari 2000 tentang pencabutan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat etnis Tionghoa, sehingga setelah dikeluarkan keputusan presiden ini masyarakat Tionghoa diperbolehkan untuk menyelenggarakan kegiatan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat dan dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus (KEMENAG 2002). Setelah ditetapkan keputusan presiden tersebut masyarakat Tionghoa dapat merayakan Imlek, menggunakan dan belajar bahasa Mandarin, tidak diwajibkan mengganti nama dan bahkan aturan-aturan lain yang sebelumnya sangat membatasi masyarakat etnis Tionghoa.

Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, keluarnya Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2014 tentang pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE/Pres.Kab/6/1967 pada 12 Maret 2014 memberikan arti tersendiri bagi masyarakat Tionghoa. Hal ini karena keputusan presiden tersebut menyangkut istilah penyebutan masyarakat Tionghoa yang awlanya dengan sebutan Tjina/China/Cina dan diganti menjadi Tionghoa (KEMENKEU 2014). Namun meskipun demikian, tindakan-tindakan diskriminatif masih saja mendarah daging pada beberapa golongan masyarakat dengan menunjukkan perilaku-perilaku anti-Cina. Pada masa Presiden Joko Widodo contohnya adalah kasus penistann agama yang dituduhkan oleh Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disebut Ahok.

Dilema Untung-Rugi: Persepsi Masyarakat Etnis Tionghoa di Surabaya Terhadap Kebangkitan Tiongkok

Fenomena kebangkitan Tiongkok atau dikenal dengan Republik Rakyat Tiongkok telah memberikan arti tersendiri bagi beberapa negara ataupun kelompok tertentu, kemudian memunculkan begitu banyak persepsi di kalangan masyarakat internasional. Disisi lain, masyarakat etnis Tionghoa yang merupakan hasil diaspora dari RRT pada masa lalu, memiliki persepsi masing-masing dalam memaknai kebangkitan Tiongkok. Persepsi secara umum dapat dipahami sebagai proses seseorang dalam memandang sesuatu. Namun secara luas, menurut Branca dan Woodworth (dalam Walgito 1981, p. 5), persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses ketika seseorang menerima suatu stimulus melalui alat indera yang masuk ke saraf lalu diteruskan ke otak sehingga memicu munculnya persepsi.

Gambar 1.1. Proses pembentukan persepsi



Sumber: Walgito 1981 dalam Arifin et al 2017, p. 91

Melalui gambar 1.1 diatas, dapat dipahami ketika individu mendapatkan rangsangan atau stimulus yang masuk dalam faktor eksternal kemudian ditambah dengan faktor internal, maka akan menghasilkan respon. Terdapat empat tahap dalam membentuk persepsi menurut Alo Liliweri (2011). Pertama adalah tahap yang lebih dipahami sebagai proses fisik, proses yang menangkap stimulus oleh alat indera atau disebut dengan tahap stimulus. Kedua adalah tahap organization atau fisiologis, yang mana pada tahap ini stimulus yang didapatkan oleh indera kemudian diteruskan dan diterima oleh reseptor melalui saraf-saraf sensoris. Ketiga adalah tahap psikologis yang disebut dengan interpretation-evaluation, merupakan proses dari munculnya kesadaran individu terkait stimulus yang diterima berdasarkan masa lalu atau informasi yang diterima saat itu juga. Tahap keempat adalah tahap memory, ketika semua stimulus telah didapatkan dan dievaluasi oleh individu maka akan terekam pada otak. Sehingga setelah itu menghasilkan tahap recall, merupakan tahap hasil dari apa yang diperoleh dan diproses oleh individu yang menghasilkan tanggapan, sikap, perilaku atau keputusan. Saparinah Sadli (1977, p. 72), menambahkan bahwa persepsi seseorang tidak hanya sebagai proses aktif yang memberikan stimulus pada panca indera saja, melainkan juga berpengaruh pada emosional seseorang yang diwujudkan seperti pada pembentukan visi dan misi, motivasi, serta berpengaruh dari sikap-sikap yang diambil.

Persepsi yang muncul di kalangan masyarakat etnis Tionghoa di Surabaya kemudian menjadi pola pikir yang juga berkaitan dengan identitas mereka sebagai etnis Tionghoa. Jean S. Phinney & Linda L Alipuria (1997, pp. 171-183) dalam tulisannya yang berjudul *Ethnic Identity in College from Four Ethnic Groups* menjelaskan bahwa identitas etnik adalah sebuah bentuk konstruk sosial yang kompleks dan mengandung ikatan atau komitmen serta *sense of belonging* pada kelompok tertentu. Identitas etnis dilihat dari beberapa aspek, yaitu: (1) *Affirmation and Belonging*, pada aspek ini dapat dilihat bahwa individu merasa nyaman dengan latar belakang etnisnya sehingga ada perasaan memiliki dan keterikatan batin terhadap kelompok etnisnya sendiri; (2) *Ethnic Behavior*, dilihat dari keterlibatan individu terhadap kegiatan-kegiatan kelompoknya; (3) *Ethnic Identity, Achievement*, yang merupakan hasil dari pembentukan identitas atau biasa disebut dengan *secure sense of self*; dan (4) *Other Group Orientation*, merupakan aspek yang melihat apakah individu cenderung berinteraksi dengan kelompok etnis lain atau tidak (Phinney & Alipuria 1997, pp. 171-183).

Disisi lain, banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya persepsi masyarakat etnis Tionghoa di Surabaya, Thoha (dalam Arifin et. al. 20117, p. 92) mengklasifikasikan faktor pembentuk persepsi menjadi dua macam, yaitu faktor internal yang dapat berupa sikap dan karakteristik individu, perasaan, perhatian, keadaan fisik, prasangka, proses belajar, harapan, nilai yang dibawa oleh tiap individu, minat dan juga motivasi. Sedangkan faktor eksternal

berbicara soal latar belakang keluarga, lingkungan, pendidikan, pengetahuan, informasi yang diperoleh, serta suatu hal yang baru terhadap objek tertentu. Gifford & Nelson (2014) disisi lain mengatakan beberapa faktor, pertama adalah personal effect yang didasari oleh kemampuan perseptual individu terhadap lingkungan yang berbeda. Kedua adalah cultural effect yang dipandang oleh Gifford & Nelson (2014) bahwa budaya tempat asal akan membentuk cara berpikir yang berbeda pada setiap individu dalam melihat dunia. Faktor bagaimana seseorang mendapatkan kualitas pendidikan juga mampu mempengaruhi individu jika berbicara pada konteks kebudayaan. Ketiga adalah physical effect yang dipahami sebagai kondisi alamiah yang datang dari lingkungan juga akan mempengaruhi seseorang dalam mengamati dan membuat persepsi. Lingkungan menciptakan karakter tertentu pada individu sehingga akan memberikan identitas tersendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah bentuk-bentuk dari rangsangan yang mendorong terbentuknya persepsi. Pada tahap ini menurut Liliweri (2011) dinamakan sebagai tahap pertama pembentukan persepsi, yakni tahap *Stimulation*. Sedangkan dalam membentuk persepsi terdapat lima proses, diantaranya yaitu: (1) *Stimulation*; (2) *Organization*; (3) *Interpretation-evaluation*; (4) *Memory*; dan (5) *Recall*. Tahap yang kedua adalah *organization*, yang mana ketika individu menerima rangsangan atau stimulus kemudian secara keseluruhan rangsangan-rangsangan tersebut dikumpulkan dan diterima oleh reseptor individu dan diproses oleh saraf sensoris memori setiap individu (Liliweri 2011). Dalam arti lain, jika responden mendapatkan rangsangan terkait memori kolektifnya sebagai etnis Tionghoa, maka responden akan memproses stimulus tersebut dan mengorganisasikan menjadi harapan dalam mengartikan kebangkitan Tiongkok Setelah tahap organisasi, maka masuk pada tahap *Interpretation-evaluation*, setelah individu mengelolah rangsangan yang datang kemudian individu memproses dan mengevaluasi dari informasi yang diterima. Memori kolektif juga dapat masuk dalam tahap ini, karena pada tahap ini juga mampu memunculkan kesadaran individu terkait stimulus yang diterima berdasarkan masa lalu. Seperti :

“Menurutku itu adalah sesuatu yang amazing. Karena itu diraih dalam waktu yang aku bilang singkat. Bahkan Tionghok kayaknya waktu itu lebih susah dari Indonesia nggak seh, kalau nggak gitu ya kita nggak mungkin diaspora kesini.... memang, Omaku pro dengan Tionghok. Tapi kemudian aku kok tidak merasa bahwa dengan kebangkitan Tionghok itu Tionghoa berharap untuk tidak di diskriminasi ya... Menurutku beda konteks malahan, karena China itu sebagai negara. Secara etnis juga Indonesia tidak merasa bagian dari mereka.”, tutur Ruli.

“Menurutku biasa-biasa aja. Maksudku nggak ada dampak tersendiri yang menyangkut soal memori kolektif itu gitu lho kalo dikaitin sama kebangkitan Tionghok”, tutur Chelsea.

“Kalau dari segi bisnis, aku ngerasa harga pasar itu sangat sangat sangat fluktuatif sekali dan nggak bisa di prediksi. Itu merupakan dampak yang kurang menyenangkan kalo menurutku. Kalau aku kan sarang Burung Wallet kan, itu harganya...woah...naik turun terus kayak ombak gitu lho haha. Tapi kalau sebagai mahasiswa, mungkin ada baiknya dunia ini nggak unipolar gitu ya wkwk. Karena menurutku multipolar bisa menimbulkan sebuah... Mmm, apa ya? Otoritarian, kalau kita Multipolar kan nggak perlu adanya check and balance kan negara...” , tutur Eko yang memberikan dua perspektif.

“Keren sih menurutku, berkembangnya bisa cepet. Dan itu nggak terlepas dari persebaran orang-orang Tionghoa yang menyebar keluar negeri itu lho. Akhirnya linknya jadi banyak... Menurutku itu ngefek ke kita seh. Mungkin sedikit emang,

maksudnya nggak kerasa gitu kan. Tapi secara nggak langsung itu juga bisa berpengaruh kan. Soalnya Papaku sendiri juga kayak kelihatan seneng gitu lho ketika tau berita-berita Tiongkok. Aku ya nggak tau seh gimana lebih tepatnya, mungkin lebih paham Papa karena Papa kan sudah ngerasain puluhan tahun jadi orang Tionghoa di Indonesia.”, tutur Bella yang melihat kebangkitan Tiongkok lebih ke arah positif.

“Tetapi kalau menurut hemat saya, Tiongkok bangkitnya paling besar itu menurut saya ya ekonominya. Lho itu perkembangannya sangat maju lho. Tiongkok itu kan menguasai ekonomi, khususnya perdagangan. Kalau dari perdagangan itu sudah maju ya otomatis yang lainnya bisa kita kontrol kan,” tutur Rudi

Setelah tahap interpretasi-evaluasi, kemudian individu merekam informasi yang menurutnya benar di otak dan kemudian menjadi memori individu, pada tahap ini disebut tahap *memory*. Pada tahap ini, biasanya individu menimbang kembali dampak atau kelebihan dan kekurangan dari fenomena yang terjadi, seperti responden penulis yang bernama Singgih, “Bagus ya menurut saya mmm.... Tapi saya kok biasa aja melihat China itu ya”. Sedangkan, berbeda dengan dan Singgih, Albert lebih melihat segi positif dari kebangkitan Tiongkok dalam tahap ini:

“Aku jujur merasa, gini sih, sometimes I hate being Chinese. Tapi disisi lain, aku merasa eventually worst case scenario kalau kita nggak diterima di Indonesia pun, I will go there. Because I need a home to go, a place I called home, I guess. Jadi aku nggak akan masalah untuk kembali kesana dan menelusuri ancestors-ku.”

Dan tahap yang terakhir adalah tahap *rezall*, yang mana pada tahap ini individu siap untuk mengeluarkan persepsi yang telah diproses. Pada tahap ini, responden yang telah mendapatkan rangsangan telah diproses dan direkam dalam memori sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan, maka keluarlah persepsi yang diungkapkan berdasarkan informasi apa yang didapatkan pula.

Setelah diurai melalui proses pembentukan persepsi, terdapat beberapa persepsi yang muncul dari keseluruhan 15 responden. Sehingga untuk menganalisis persepsi masyarakat etnis Tionghoa di Surabaya terhadap kebangkitan Tiongkok menghasilkan persepsi bahwa kebangkitan Tiongkok mampu memicu bangkitnya *sense of ethnic pride and legitimation* dan membuat obat bagi perilaku-perilaku diskriminasi. Timbulnya memori kolektif masyarakat etnis Tionghoa di Surabaya terkait peristiwa-peristiwa di masa lalu mempengaruhi responden untuk menjelaskan persepsinya :

“...sebagai orang Tionghoa dengan latar belakang yang sama, apalagi ada beberapa diantara kita yang masih punya kerabat disana kan, ya jelas lah kita bangga melihat kebangkitan Tiongkok. Dan jelas memang iya membangkitkan sense of ethnic pride, kayak misal di Surabaya aja dengan bangkitnya Tiongkok kan sudah mulai masuk perusahaan-perusahaan Tiongkok ke Indonesia dan itu kayak istilahnya bener-bener bahwa kita itu ingin menunjukkan bahwa ‘orang Tionghoa iki lho (bahasa arekan: ini lho) kemampuannya kita sampe seperti ini’. Memang ada orang-orang yang kolot dan tradisionalis bahkan lebih bangga dari kita deh, karena memang mereka yang sudah tua-tua itu misalnya, kayak Omaku itu kan dia takut kalau kebudayaan dan tradisi dari Tionghoa itu hilang gitu kan. Tapi dengan bangkitnya Tiongkok, mereka yang sudah tua-tua ini khususnya bisa mengingat kembali dan nunjukin ke anak-cucunya bahwa ini lho kita bisa bangkit. Negara asal mereka sudah bangkit...terus juga ada beberapa keluarga

yang memegang teguh tradisi dan ada juga sampe kita itu sebagai anak-anaknya di doktrin kayak, 'kamu nanti lek wes besar kudu inget ini' (bahasa arekan: kamu nanti kalau sudah besar harus inget ini), bener-bener kita di doktrin kalau kita itu Chinese, kayak gitu.", tutur Anchilla dengan panjang yang menunjukkan bahwa kebangkitan Tiongkok memang memiliki pengaruh yang besar bagi etnis Tionghoa.

"Menurutku itu ngefek ke kita seh. Mungkin sedikit emang, maksudnya nggak kerasa gitu kan. Tapi secara nggak langsung itu juga bisa berpengaruh kan. Soalnya Papaku sendiri juga kayak kelihatan seneng gitu lho ketika tau berita-berita Tiongkok. Aku ya nggak tau seh gimana lebih tepatnya, mungkin lebih paham Papa karena Papa kan sudah ngerasain puluhan tahun jadi orang Tionghoa di Indonesia. Tapi aku juga nggak bisa memungkiri kalau kebangkitan China mainland juga berdampak ke kita. Paling nggak status sosial kita sedikit lebih naik gitu.", tutur Bella.

"Bangga, itu jelas. Misal adek pindah dari daerah asal ya. Kemudian setelah pindah, daerah asal adek ini maju, kan ikut bangga juga toh pastinya? Gimana enggak? Kira-kira seperti itu. meskipun saya sendiri nggak pernah ke Tiongkok, tapi ini kan Paklik-Bulik saya kan kembali ke Tiongkok. Dan memang keren. Mungkin karena juga saya punya hubungan kekeluargaan dengan orang sana ya, maksudnya keluarga saya disana. Makanya saya bangga. Bangga sekali, sekalipun saya orang Indonesia.", tutur Syamsul.

"Maksudnya memupuk rasa bangga terhadap etnis Tionghoa sendiri gitu ta mbak? Oh ya jelas mbak. Karena kita kan itungannya juga masih satu ras, masih sama kan ya. Saya juga masih punya keluarga disana. Jelas saya bangga. Ditambah dulu juga eee... apa ya? Sejarah kita kan dulunya juga seperti itu. jelas itu, karena kan ya gimana-gimana juga kita ndak isa lepas dari nenek moyang kita. Terus kalau China maju juga kita yang awalnya dikenal individu ya tapi ya enggak. Soalnya dengan liak China maju gitu smakin membuktikan kalau orang China itu memang tekun jadi ya cepet suksesnya. Ndak individualis kayak mau nguasai sendiri. Ndak.", tutur Puspa Lien.

Anchilla, Bela, Syamsul dan Puspa Lien adalah responden yang menganggap bahwa secara keseluruhan kebangkitan Tiongkok dapat membangkitkan *sense of ethnic pride and legitimation* bagi masyarakat etnis Tionghoa. Persepsi ketiga responden tersebut didasari pada beberapa faktor. Puspa Lien dan Syamsul dengan umur yang terhitung tua berpendapat bahwa rasa bangga dan legitimasi yang didapatkan karena dilihat dari latar belakang masa lalunya yang sering mendapatkan diskriminatif dan ditambah dengan latar belakang keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga yang berada di Tiongkok. Sedangkan Anchilla dan Bella dengan umur yang terbilang muda seringkali mendapat doktrin dari keluarga yang kemudian membentuk persepsi terhadap pemahaman fenomena kebangkitan Tiongkok :

"Iya, betul. Bangga. Sangat bangga. Karena kita punya latar belakang yang sama kan. Apalagi kalau Indonesia bisa seperti Tiongkok, dua kali lebih bangga aku hahaha. Soalnya kan Nenekku itu juga sering cerita soal dulu ya, terus begitu aku lihat Tiongkok bangkit gitu ya... menurutku keren.", tutur Anchilla.

Tidak jauh berbeda dengan Anchilla, Syamsul dan Puspa Lien, beberapa responden yang lain justru memiliki persepsi yang berbeda. Seperti responden Singgih yang menganggap bahwa

kebangkitan Tiongkok tidak berdampak pada kehidupan sehari-hari, “Bagus ya menurut saya mmm.... Tapi saya kok biasa aja melihat China itu ya”. Tetapi disisi lain jika berbicara dalam konteks *sense of ethnic pride and legitimation*, justru menyetujui bahwa kebangkitan Tiongkok dapat menimbulkan rasa bangga dan menjadi obat untuk *anti-chinese feeling* di kalangan masyarakat. Bahkan Singgih juga memiliki ikatan dan sering diundang oleh kedutaan dan konsulat Tiongkok :

“Oh ya jelas, karena kita kan punya nenek moyang disana. Jadi bisa lebih memberikan pemahaman ke masyarakat ya, bahwa ndak perlu lagi diskriminasi. Orang ini sudah ndak jamannya. Kalau soal Tiongkok juga, kapan lalu kami diundang di acaranya Konsulat Jenderal Tiongkok itu di hotel mana saya lupa. Jadi kita masih berhubungan baik sebenarnya... Dan Kakek dan Nenek saya kan dari sana juga, jadi masih ada rasa memiliki ya.”

Singgih merupakan responden yang berumur 62 tahun dengan latar belakang keluarga dan lingkungan mampu mendukung Singgih untuk membentuk persepsi sedemikian rupa. Lebih dalam lagi diungkapkan oleh responden yang bernama Albert, mengatakan bahwa Tiongkok adalah rumah kedua setelah Indonesia :

“Iya, memang nggak salah. Makanya aku bilang tadi sebelum aku tau Tiongkok itu keren di ekonomi dan lain-lain. Ya aku mau tinggal di Indonesia, regardless of how good I feel or what I feel. Misalnya sometimes I feel belong, sometimes I don't belong, Indonesia is the only home for me. Tapi setelah beberapa kali aku ngobrol sama temanku dari Tiongkok, belajar mandarin dan sebagainya, I feel like there's a home that I can go in case this home it doesn't worked out. Jadi intinya kalau mbak bilang soal ethnic pride and legitimation orang Tionghoa, itu ada.”

Kebanggaan yang berlebihan ditambah dengan begitu banyak rasa traumatis yang dialami membuat Albert merasa bahwa dengan kebangkitan Tiongkok dapat memberikan kesempatan untuk hidup lebih aman di negara tersebut. Hal ini dibuktikan oleh penulis dari beberapa kalimat Albert ketika menjawab mengenai makna kebangkitan Tiongkok :

“Aku jujur merasa, gini sih, sometimes I hate being Chinese. Tapi disisi lain, aku merasa eventually worst case scenario kalau kita nggak diterima di Indonesia pun, I will go there. Because I need a home to go, a place I called home, I guess...”

Sedangkan dalam berbicara mengenai legitimasi, Albert menyepakati bahwa dengan bangkitnya Tiongkok mampu memberikan kebebasan legitimasinya sebagai etnis Tionghoa di Surabaya :

“Lebih ke... mungkin legitimasi mungkin... secara konstruksi sosial mungkin kita menyadari bahwa China is superpower and Chinese people in some aspects, superior. Dan itu memberikan aku legitimasi yang memang aku ini diasosiasikan Tiongkok yang tajir (kaya) and getting bigger. Eventhough kadang aku juga diasosiasikan dengan kejelekan mereka, seperti Uyghur.”

Berbeda dengan Albert, Rudi yang berumur 48 tahun dengan latar belakang utama yang Rudi miliki adalah adanya rasa persamaan identitas dan nilai-nilai nenek moyang sehingga berpendapat bahwa kebangkitan Tiongkok dapat membangkitkan rasa bangga sebagai etnis Tionghoa :

“Saya jawab YA, karena mau bagaimanapun saya bangga karena sandainya semua orang Kalimantan sukses, ya saya senang. Begitu juga dengan saya sebagai orang Tionghoa, keturunan Tionghoa. Saya senang ada yang sukses, oh yasudah sukses. Seperti Ahok bisa jadi Gubernur, ya saya senang. Dan kalau TIDAK, itu menentang arus yang sangat besar dek. Kamu lihat dalam perpolitikan, kayak Ahok kamu kecekluk (bahasa arekan: keseleo) dikit wes jadi masalah kamu haha. Karena memang sudah diincar dari dulu. Dan kalau sense of ethnic pride, jelas bangga karena dia negara nenek moyang saya.”

Dari pernyataan responden di atas, Rudi merasa senang dengan kebangkitan Tiongkok karena mampu membangkitkan *sense of ethnic pride* sebagai etnis Tionghoa, namun disisi lain penulis melihat masih terdapat rasa khawatir dalam pola pikir Rudi sebagai etnis Tionghoa jika dilihat dari kalimat, “Dan kalau TIDAK, itu menentang arus yang sangat besar dek. Kamu lihat dalam perpolitikan, kayak Ahok kamu *kecekluk* (bahasa arekan: keseleo) dikit wes jadi masalah kamu haha. Karena memang sudah diincar dari dulu”, yang berarti sebagai etnis Tionghoa harus berhati-hati dalam setiap tindakannya. Hal ini tidak lepas dari memori Rudi yang secara langsung beliau rasakan pada peristiwa masa lalu dalam sejarah Indonesia. Disisi lain, Rudi juga belum merasakan dampak yang signifikan terhadap legitimasi sebagai etnis Tionghoa :

“Bisa dibilang begitu. Mungkin kalau dalam skala luas ya sudah beberapa, tapi kalau skala kecil saya sering kali alami kesusahan dalam mengurus legitimasi saya sebagai warga negara dengan keturunan Tionghoa. Pokoknya semuanya sama, orang Tionghoa itu dianggap berduit, akhirnya diperslit biar dapet duit. Sama seperti konotasi dokter itu pasti kaya, padahal juga enggak.”

Berbeda dengan beberapa responden sebelumnya, justru responden yang bernama Ruli, Chelsea, Eko, Jason, Kezya, Adon, Hariyono dan Troy justru dengan tegas mengatakan bahwa kebangkitan Tiongkok tidak berdampak dalam membangkitkan *sense of ethnic pride and legitimation* mereka sebagai etnis Tionghoa:

“Kalau aku sendiri enggak ngerasa. Tapi ke legitimasi enggak seh. Aku biasa aja, maksudnya nggak ada perubahan gitu. Soalnya nggak ada hubungannya, dengan Tiongkok bangkit pun mereka juga nggak akan bisa mengintervensi ke Indonesia untuk jangan mendiskriminasi masyarakat Tionghoa di Indonesia. Mereka itu lho juga menganggap bahwa chinese diaspora itu sudah bukan lagi bagian dari Tiongkok sendiri.” Tutur Ruli.

“Kalau yang aku lihat itu kok masih tetep kurang ya haha. Dampaknya juga belum kelihatan banget gitu buat aku sama keluargaku. Menurutku biasa-biasa aja. Maksudku nggak ada dampak tersendiri yang menyangkut soal memori kolektif itu gitu lho kalo dikaitin sama kebangkitan Tiongkok. Bahkan sampe sekarang juga masih ada yang diskriminasi, meskipun berkurang ya, tapi tetep ada nggak seeh mbak?”, tutur Chelsea.

“Aku sendiri? Secara pribadi ndak ngerasa gitu sih hahahaha... nggak kerasa gitu sama sekali. Tiongkok bangkit, yaudah gitu. Terus mau apa lagi? Haha. Kecuali kalau Indonesia, Indonesia bangkit ya seneng lah pasti... Ya kalau misalnya Indonesia jadi negara besar, terus kerja sama luar negerinya bagus, ekonominya bagus, ditambah banyak prestasi internasional yang di dapat dalam segala bidang... yaa seneng lah pasti. Tapi kalau China ya kan ndak pernah tinggal disana yaa gatau, Kak wkwk.”, tutur Jason.

“Enggak, kalau aku ya. Maybe I’m proud to be Chinese Indonesian, tapi sewaktu kita atau aku ke luar negeri we don’t say that we are Chinese Indonesian but I’m Indonesian hehe. Kita mah biasa aja melihat kebangkitan Tiongkok. Karena kita memang dari kecil lho kita di Indonesia, rek! Jadi kita ngelihatnya lebih ke, ‘Oh yaudah Tiongkok bangkit berarti kita harus belajar Mandari’ gitu aja wes. Semua pasti akan kembali ke bisnis wkwk”, tutur Eko.

“Saya biasa aja, paling ya cuma lebih dibuat perbandingan atau pelajaran. Dilihat dari cara hidup mereka bagus ya harus ditiru kan. Mungkin ada yang begitu. Tapi kalau saya ya biasa saja, karena saya nggak ada hubungan kan sama orang sana. Jadi ya biasa aja. Bahkan legitimasi juga biasa aja, buat saya kebangkitan Tiongkok nggak ada pengaruhnya buat kita. Buat menghilangkan rasa diskriminasi yang mendalam dan mendarah daging di rakyat Indonesia gitu lho. Nggak bisa menghilangkan rasis disini.”, tutur Adon

“Saya, biasa saja. Karena saya pikir itu memang kerja keras Tiongkok ya. Tapi itu tidak berdampak pada saya. Mungkin ya saya merasakan teknologinya mungkin ya, tapi kalau berdampak jelas tidak. Kecuali kalau Indonesia mampu seperti itu. tapi memang ada rasa senang, karena kita kan satu ras ya hitungannya. Ya hanya sekedar itu saja.”, tutur Hariyono.

“Biasa aja, saya malah malu. Bayangkan aja saya sering impor dari China, semua Made in China. Saya kok sebagai pengusaha juga malah mikirnya kenapa nggak Made in Indonesia semua gitu kan bisa menguntungkan pengusaha juga, kayak kertas gitu. Biar ndak usah impor wkwk”, tutur Troy

Dari delapan responden diatas, penulis melihat latar belakang yang berbeda. Seperti Ruli, Jason dan Kezya, meskipun ketiganya mendapatkan doktrin dari keluarga untuk lebih bangga menjadi etnis Tionghoa namun mereka berhasil memproses stimulus tersebut dan mengorganisasikan dengan informasi-informasi yang diterima, ditambah dengan nilai-nilai nasionalis yang muncul dari ketiganya. Pada responden Hariyono, meskipun berumur 46 tahun dan memahami tentang sejarah masyarakat etnis Tionghoa pada masa lalu, kemudian tidak membuat Hariyono merasakan meningkatnya *sense of ethnic pride and legitimation* sebagai masyarakat Tionghoa. Hal tersebut karena dapat dilihat dari latar belakang Hariyono yang sejak kecil berada di lingkungan pendidikan dan mengajarkan toleransi yang tinggi. Sedangkan bagi Ruli, Jason, dan Kezya tetap berpersepsi bahwa kebangkitan Tiongkok tidak berdampak sama sekali meskipun telah mendapatkan doktrin dari keluarga. Dari ketiga responden tersebut, berawal dari doktrin keluarga membuat mereka merasa khawatir dengan lingkungan sekitar. Namun ketika ketiga responden tersebut membaur dengan masyarakat luas dan semakin banyak belajar mengenai Indonesia, maka informasi tersebut diproses dengan pemikiran mereka masing-masing dan kemudian mendorong terbentuknya persepsi mereka bahwa mereka seharusnya bangga menjadi bangsa Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa faktor internal juga berpengaruh dalam pembentukan persepsi. Menambahkan dari jawaban Eko dan Ruli yang menjelaskan bahwa *ethnic pride* mungkin akan muncul pada golongan etnis Tionghoa yang sudah tua :

“Meskipun kita keturunan Tionghoa, tapi tetep kita orang Indonesia. Kecuali kalau Nenekku gitu lho, karena memang latar belakang dia dari Tiongkok bahkan kadang di rumah ngomong Mandarin.... mungkin untuk masyarakat Tionghoa yang sudah sepuh umur 60an keatas, mereka proud. Karena mereka masih

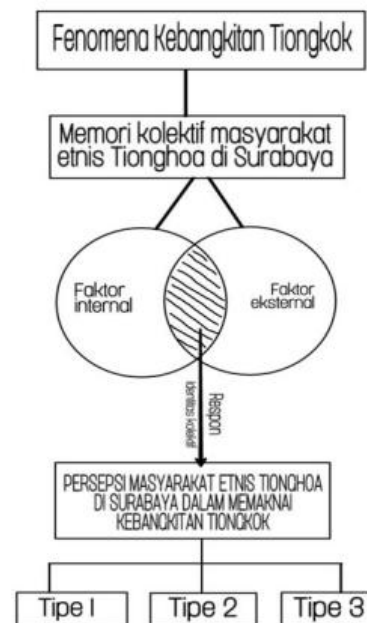
ada...apa ya? Intinya lebih dekat dengan nenek moyangnya yang di Tiongkok. Mereka masih merasakan ‘they are part of Tiongkok’. Contohnya Nenekku sendiri, masih punya keluarga di Tiongkok sana. Dan waktu Tiongkok berhasil membuat kapal induk terbesar yang ngalahin kapal induknya Amerika...wuih, dia itu bangga banget. Dia nonton berita itu sampe seneng banget. Tapi aku biasa aja. Papa sama Mamaku kan sudah orang Indonesia, we speak Indonesian, ya we are Indonesian.”, tutur Eko

“Apalagi kan Omaku kan serumah sama aku, sangat kuat waktu itu tertanam bahwa feeling proud to be Chinese itu ada gitu lho. Secara naluriah itu ada memang. Dan di doktrin etnis Tionghoa itu etnis yang paling unggul gitu lho diantara etnis lain... Memang bener kalau meningkatkan sense of ethnic pride terutama di golongan-golongan yang tua. Kalau yang milenial itu jarang ada.”, tutur Ruli

Setelah penulis menganalisis keseluruhan hasil wawancara responden, penulis menemukan beberapa tipe responden dalam mempersepsikan makna kebangkitan Tiongkok. Dari skema tipologi disamping, penulis menggolongkan menjadi tiga tipe responden, yaitu *approving*, *middle* dan *denying*.⁶ Tipe pertama adalah *approving*, kelompok yang setuju bahwa dengan kebangkitan Tiongkok, *sense of ethnic pride* dan legitimasi mereka sebagai masyarakat etnis Tionghoa di Surabaya semakin meningkat. Disisi lain, mereka juga menganggap secara tidak langsung bahwa dengan bangkitnya Tiongkok dapat memudahkan diskriminasi atau kesenjangan yang ada antara masyarakat etnis Tionghoa dengan etnis yang lainnya. Responden yang masuk dalam tipe ini biasanya sekitar umur 50-65 tahun. Namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pula responden yang berumur di bawah 25 tahun masuk dalam tipe ini, hal tersebut karena didorong oleh banyak faktor. Kedua adalah tipe *middle* yang berada diantara *approval* atau *denial*, responden dalam tipe ini merasa bahwa kebangkitan Tiongkok memiliki dampak kepada diri mereka sebagai etnis Tionghoa tetapi tidak memberikan efek yang begitu signifikan terhadap *sense of ethnic pride* ‘atau’ legitimasi mereka sebagai etnis Tionghoa di Surabaya. Pada tipe ini responden juga tidak menganggap bahwa bangkitnya Tiongkok dapat digunakan sebagai obat masa traumatis dan dapat memudahkan diskriminasi atau kesenjangan yang ada antara masyarakat etnis Tionghoa dengan etnis yang lainnya. Responden yang masuk dalam tipe kedua dalam tipologi ini lebih banyak responden dengan umur sekitar 20-50 tahun.

Sedangkan tipe yang ketiga atau disebut dengan tipe *denying* adalah responden yang tidak menyetujui, menolak dan berpendapat bahwa kebangkitan Tiongkok tidak berdampak sama sekali. Terutama pada *sense of ethnic pride* dan legitimasi mereka sebagai etnis Tionghoa di Surabaya. Beberapa diantara mereka menganggap bahwa kebangkitan Tiongkok tidak mampu memberikan kontribusi dalam memudahkan diskriminasi atau kesenjangan yang ada antara masyarakat etnis Tionghoa dengan etnis yang lainnya. Hal itu karena didasari oleh

Skema 4.1. Tipologi Hasil Wawancara Responden



⁶ Penulis menggunakan istilah tersebut berdasarkan hasil dari wawancara kepada seluruh responden yang dikonklusikan menjadi penolakan, penerimaan atau berada diantara keduanya terhadap kebangkitan Tiongkok.

pemikiran mereka yang menganggap bahwa kebangkitan Tiongkok tidak ada hubungannya dengan etnisitas. Ditambah menurut analisis penulis, responden dalam tipe ini adalah kelompok orang-orang Tionghoa yang memiliki rasa nasionalis yang tinggi. Secara lebih jelas, penulis menganalisis perbedaan ketiga tipe tersebut melalui tabel di bawah ini :

Tabel 4.1. Tabel perbedaan tipe responden

| ASPEK | TIPE 1 | TIPE 2 | TIPE 3 |
|------------------|--|--|--|
| Faktor Eksternal | Latar belakang keluarga kuat mendukung untuk menciptakan <i>sense of proud</i> sebagai etnis Tionghoa, kemudian individu menyetujui | Latar belakang keluarga kuat mendukung untuk menciptakan <i>sense of proud</i> sebagai etnis Tionghoa, kemudian individu menyetujui | Latar belakang keluarga kuat mendukung untuk menciptakan <i>sense of proud</i> sebagai etnis Tionghoa, kemudian individu belum tentu menyetujui. |
| | Interaksi sosial hanya sebatas lingkungan yang masih dalam ruang lingkup etnis Tionghoa, tetapi tidak menolak untuk terbuka dengan masyarakat umum. | Interaksi sosial hanya sebatas lingkungan yang masih dalam ruang lingkup etnis Tionghoa, tetapi mulai terbuka dengan masyarakat umum. | Interaksi sosial tidak hanya sebatas lingkungan yang masih dalam ruang lingkup etnis Tionghoa, sehingga telah membaur dalam masyarakat umum. |
| Faktor Internal | Biasanya mengalami kejadian secara langsung dengan mendengar, merasakan ataupun melihat. | Biasanya mengalami kejadian secara langsung dengan mendengar, merasakan ataupun melihat. | Belum tentu mengalami kejadian secara langsung dengan mendengar, merasakan ataupun melihat. |
| | Memori Individu lebih dominan dalam membentuk persepsi. | Memori individu tidak begitu dominan dalam membentuk persepsi. | Memori individu tidak begitu dominan atau justru tidak ada memori individu dalam membentuk persepsi. |
| | Berharap atau merasakan secara langsung bahwa kebangkitan Tiongkok mampu memberikan perubahan yang signifikan dan mampu memperbaiki status sosial, legitimasi dan <i>ethic pride</i> . | Tidak berharap atau tidak merasakan secara langsung bahwa kebangkitan Tiongkok memberikan perubahan yang signifikan, tetapi tetap berharap dapat memperbaiki status sosial, legitimasi dan <i>ethic pride</i> karena beberapa nilai yang dipegang. | Tidak berharap atau tidak merasakan secara langsung bahwa kebangkitan Tiongkok mampu memberikan perubahan yang signifikan dan mampu memperbaiki status sosial, legitimasi dan <i>ethic pride</i> . |

Dari total keseluruhan 15 responden yang penulis dapatkan dan setelah menganalisis hasil wawancara dengan responden, maka empat responden masuk dalam tipe 1 atau tipe *approving*, yaitu Anchilla, Bella, Syamsul dan Puspa Lien. Tiga diantaranya masuk dalam tipe 2 atau *middle*, yaitu Singgih, Rudi dan Albert. Dan sisanya tergolong pada tipe 3 atau *denying* sebanyak delapan orang.

Kesimpulan

Masyarakat etnis Tionghoa memiliki memori yang buruk sepanjang sejarah Indonesia. Mengenai pembantaian, pemerkosaan dan perilaku-perilaku yang diskriminatif, rasial atau anti-cina dialami oleh kelompok masyarakat etnis Tionghoa saat tahun 1998 sebagai *turning point* memori kolektif mereka. Namun tidak hanya pada peristiwa Mei 1998, tetapi jauh dari itu perilaku-perilaku yang tidak manusiawi sudah terjadi. Terkait memori kolektif masyarakat etnis Tionghoa yang dimulai sejak VOC datang ke Indonesia. Peristiwa Geger Pecinan di Batavia merupakan titik awal timbulnya sikap-sikap rasial, diskriminasi dan *anti-chinese feeling*. Sampai Indonesia Merdeka, etnis Tionghoa masih belum bisa bernafas lega karena dilibatkan dengan isu komunisme dan menjadi pendukung partai PKI di tahun 1965. Sehingga melalui hasil analisis yang telah penulis golongkan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kebangkitan Tiongkok dianggap menjadi fenomena besar yang memberikan dua, yaitu sisi positif dan negatif. Tergantung pada bagaimana individu mengartikan fenomena tersebut. Disamping itu, kebangkitan Tiongkok juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *sense of ethnic pride and legitimation* untuk masyarakat etnis Tionghoa. Meskipun secara historis masyarakat Tionghoa selalu menjadi kambing hitam dan mendapatkan perilaku-perilaku yang diskriminatif. Namun dengan bangkitnya Tiongkok dianggap tidak mampu memberikan peluang untuk menghapus perilaku-perilaku diskriminatif dan sinofobia atau *anti-chinese feeling* di kalangan masyarakat tersebut. Secara keseluruhan persepsi masyarakat etnis Tionghoa di Surabaya tidak diuntungkan dengan adanya kebangkitan Tiongkok sebagai raksasa Asia, jika dilihat dalam beberapa konteks tertentu.

Referensi :

Arsip

Pemberita Betawi, 22 Agustus 1901.
Pikiran Rakyat, 6 Juni 1998.
Sin Po, 8 Oktober 1932, hlm. 444-445.
Suara Pembaruan, 7 Mei 1998.
Staatsblad van Nederlandsche Indie, No. 57 Tahun 1866.
The Jakarta Post, 15 Agustus 2003.
Waspada, 7 Mei 1998.

Buku

Blackburn, Susan. tt. 2017. "Jakarta: Sejarah 400 Tahun", *Sejarah Kebencian Terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia* [daring]. Tersedia di <https://www.tionghoa.info/sejarah-kebencian-terhadap-etnis-tionghoa-di-indonesia/> (Diakses pada 28 Maret 2019).
Coppel, Charles. 2002. *Studying Ethnic Chinese in Indonesia*. Singapura: Singapore Society of Asian Studies.
Cosser, Lewis. 1992. *Maurice Halbwachs on Collective Memory*. London: The University of Chicago Press.

- Effendi, Wahyu & Prasetyadji. 2008. *Tionghoa dalam Cengkeraman SBKRI*. Jakarta: Visimedia, hlm. 10-20.
- Kristiantoro, Michael J. 2018. *Dari Tionghoa Ke Tjina: Telaah Sejarah Terhadap Demonisasi Etnis Tionghoa Di Indonesia*, hlm. 40-41.
- Liliweri, Alo. 2011. *Komunikasi Serba Ada serba Makna*, Jakarta: Prenada Group
- Noordjanah, Andjarwati. 2010. *Komunitas Etnis Tionghoa di Surabaya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- O'Rourke, K.2002. *Reformasi. The struggle for power in Post-Soeharto Indonesia*. Crows Nest, NSW: Allen & Unwin.
- Perkasa, Adrian. 2012. *Orang-orang Tionghoa dan Islam di Majapahit*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, hlm. 47.
- Rommelink, Willem G. J. 2017. *Perang Cina dan Runtuhnya Negara Jawa, 1725-1743*, dalam Subroto, "Geger Pacinan 1740: Kegagalan Manajemen Chaos Di Negara Islam Kartasura", *Syamia Laporan Khusus*, 8th ed.
- Sadli, Saparinah. 1977. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Subroto. 2017. "Geger Pacinan 1740: Kegagalan Manajemen Chaos Di Negara Islam Kartasura", *Syamia Laporan Khusus*, 8th ed.
- Suryadinata, Leo. 1994. *Politik Peranakan Tionghoa di Jawa*. Jakarta: Sinar Harapan
- Susanto, Andreas. 2011. "Diversity in Compliance", dalam Marleen Dieleman et. al., *Chinese Indonesians and Regime Change*. Leiden: Koninklijke Brill NV, hlm. 69.
- Vermeulen, Johannes Theodore. "De Chineezten te Batavia en de Troebelen van 1740" (terj.), Triwira, Gatot. 2010. *Tionghoa di Batavia dan Huru-hara 1740*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Walgito, Bimo. 1981. *Pengantar Psikologi Umum*..Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Willmott, Donald E. 1961. *The National Status of The Chinese in Indonesia*. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, hlm. 25-28.

Jurnal

- Arifin, Hadi Suprpto, Ikhsan Fuady & Engkus Kuswarno. 2017. "Factor Analysis That Effect University Student Perception In Untirta About Existence Of Region Regulation in Serang City", dalam *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, vol. 21 (1).
- Callahan, William A. 2013. *China Dreams: 20 Visions of the Future*. New York: Oxford University Press.
- Evi Fitriani. 2018. "Indonesian perceptions of the rise of China: dare you, dare you not", dalam *The Pacific Review*, Routledge.
- Gifford, Robert & Andreas Nilsson. 2014. "Personal and social factors that influence pro-environmental concern and behaviour: A review", dalam *International Journal of Psychology*, vol. 49 (3).
- Hirst, William & David Manier. 2008. "Towards a psychology of collective memory", dalam *Memory*, vol. 16 (3).
- Lev, Daniel S. 1985. "Colonial Law and Genesis of The Indonesian State", dalam *Indonesia*, Vol. 40,
- Panggabean, Samsu Rizal & Benjamin Smith.. 2011. "Explaining Anti-Chinese Riots in Late 20th Century Indonesia", dalam *World Development*, vol. 39 (2).
- Phinney, Jean S. & Linda L. Alipuria. 1990. "Ethnic Identity in College from Four Ethnic Groups", dalam *Journal of Adolescence* Vol. 13 (2). California: California States University
- Risse-Kappen, Thomas. 1991. "Public Opinion, Domestic Structure, and Foreign Policy in Liberal Democracies", dalam *World Politics*, vol. 43 (4), pp. 479-512.

- Suryadinata, Leo. 2001. "Chinese Politics In Post-Suharto's Indonesia: Beyond The Ethnic Approach", dalam *AsianSurvey*, vol. 41 (3)
- Suryadinata, Leo. 2003. "Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturalisme", dalam *Antropologi Indonesia*, vol. 71.

Media Massa Online

- Alwi Shahab. 2016. *Ratusan Ribu Warga Cina Diusir di Zaman Sukarno* [daring]. Tersedia di <https://www.republika.co.id/berita/selarung/nostalgia-abah-alwi/16/10/15/of2ggd282-ratusan-ribu-warga-cina-diusir-di-zaman-sukarno> (Diakses pada 7 April 2019).
- CNN Indonesia. 2018. *Sekitar 1.000 Perusahaan China Beroperasi di Indonesia*[daring]. Tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181127132649-92-349567/sekitar-1000-perusahaan-china-beroperasi-di-indonesia> (Diakses pada 11 Januari 2018).
- CNN Indonesia. 2019. *Jatuh Bangun Etnis Tionghoa dalam Politik Indonesia* [daring]. Tersedia di <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190205120557-32-366561/jatuh-bangun-etnis-tionghoa-dalam-politik-indonesia> (Diakses pada 15 Mei 2019).
- Info Publik, 14 Mei 2018, *Bantu Darah Korban Teror Bom, Warga Surabaya Masih Berdatangan di PMI Surabaya* [daring]. Tersedia di <http://infopublik.id/read/268310/bantu-darah-korban-teror-bom-warga-surabaya-masih-berdatangan-di-pmi-surabaya.html?video=> (Diakses pada 15 Mei 2015).

Publikasi dan Artikel Online

- Aziz, Munawir. 2017. *Tionghoa dalam Sejarah Gelap 1965* [daring]. Tersedia di <https://www.jawapos.com/opini/sudut-pandang/03/10/2017/tionghoa-dalam-sejarah-gelap-1965/> (Diakses pada 8 April 2019).
- Isnaeni, Hendri F. 2010, *Duka Warga Tionghoa* [daring]. Tersedia di <https://historia.id/politik/articles/duka-warga-tionghoa-DbKmv> (Diakses pada 7 April 2019)
- Marzali, Amri. 2015, *Sejarah Migrasi dan Populasi Kelompok Etnis Tionghoa* [daring]. Tersedia di <https://www.tionghoa.info/sejarah-migrasi-dan-populasi-kelompok-etnis-tionghoa/> (Diakses pada 9 Januari 2019).
- Mukhti, M. F. 2010. *Si Penyelundup yang Humanis: Kisah Laksamana Terkemuka di Masa Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan* [daring]. Tersedia di <https://historia.id/militer/articles/si-penyelundup-yang-humanis-DbL2P> (Diakses pada 15 Mei 2019).
- Setiyono, Budi. 2017. *Warga Tanpa Negara* [daring]. Tersedia di <https://historia.id/politik/articles/warga-tanpa-negara-vYbOa> (Diakses pada 15 Maret 2019).
- Tan, Herman. 2015. "Suku Manchu", dalam *Tionghoa* [daring]. Tersedia di <https://www.tionghoa.info/suku-manchu/> (Diakses pada 10 Maret 2019).
- Vinh LE, *Great Power of China* [daring]. Tersedia di www.academia.edu/7269249/Great_power_of_China (Diakses pada 3 Januari 2019).
- Wargadiredja, Arzia Tivany. 2018. *Pengakuan Pelaku Kerusuhan Mei 98: Korban Operasi Kerusuhan Sistematis* [daring]. Tersedia di https://www.vice.com/id_id/article/a3av7e/pengakuan-para-pelaku-penjarahan-mei-98-korban-operasi-kerusuhan-sistematis (Diakses pada 15 Mei 2019).
- Wattimena, Reza. 2009. *Fenomenologi Edmund Husserl* [daring]. Tersedia di <https://rumahfilsafat.com/2009/08/19/fenomenologi-edmund-husserl/> (Diakses pada 14 Februari 2019)

Situs Resmi

KEMENKEU. 2014. *Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2014* [daring]. Tersedia di <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/12TAHUN2014Kpres.HTM> (Diakses pada 20 April 2019).

KEMENAG. 2000. *Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000* [daring]. Tersedia di <http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/2098-6-keputusan-presiden-nomor-6-tahun-2000-tentang-pencabutan-instruksi-presiden-nomor-14-tahun-19> (Diakses pada 20 April 2019).

Wawancara

Ruli Elisa Feby
Bella Afriliany Hendrata
Chelsea Gruzynski
Albert*
Jason Joshua Chandra
Troy Richardo
Kezya*
Singgih Santoso (Jhoe Lie Hing)

Stephany Ruth Anchilla
Puspa Lien*
Eko Ratmoko
Rudi*
Ahmad Hariyono Ong
M. Syamsul A.(Auw Yong Kwok Heng)
Y. Tri Adona

∞